

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANDAH)****Oleh:****TETTY TIFFANI**
NIM.11375200281

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang artinya penelitian bersifat mengemukakan fakta. Sedang teknik analisa data yaitu menganalisa data secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik untuk memperoleh data menggunakan wawancara terhadap narasumber atau informan yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan. Selain itu, data diperoleh pula dari studi dokumentasi melalui laporan, disamping itu juga melalui pengamatan langsung. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010, adalah implementasi kebijakan berupa target atau realisasi dan upaya pemerintah daerah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa problem utama Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 adalah kurang lengkapnya pendataan bangunan sarang burung walet, lemahnya sosialisasi, serta masih kurangnya kesadaran para pengusaha untuk membayar pajak. Penelitian ini menggambarkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 masih belum efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi masih menjadi kelemahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah Daerah ke depan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Faktor-Faktor pendukung dan penghambat, Perda Nomor 22 Tahun 2010